



Katalog BPS : 4102004.8271

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TERNATE

WELFARE INDICATORS IN TERNATE CITY

2015



<http://ternatekota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TERNATE

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA TERNATE 2015**

<http://ternatekota.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TERNATE 2015

No. Katalog	: 4102004.8271
No. Publikasi	: 82712.1501
Ukuran Buku	: 17.6 cm x 24.99 cm
Jumlah Halaman	: viii + 96
Naskah	: BPS Kota Ternate
Penyunting	: BPS Kota Ternate
Gambar Kulit	: BPS Kota Ternate
Diterbitkan oleh	: BPS Kota Ternate
Dicetak oleh	: BPS Kota Ternate

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate merupakan publikasi kedua BPS Kota Ternate yang menyajikan data tentang indikator kesejahteraan rakyat Kota Ternate. Data yang digunakan bersumber dari Susenas, Sakernas, Proyeksi Penduduk berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Kota Ternate dalam Angka.

Dimensi kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semua dapat diukur. Menyadari hal tersebut, publikasi ini hanya mencakup pada beberapa aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dikaji dalam publikasi ini meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta bidang sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Ternate, Oktober 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Ternate

Ir. Nurhidayat Maskat, M.Si
NIP. 19670413 199212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Singkatan dan Akronim	viii
1 Kependudukan	1
2 Kesehatan	15
3 Pendidikan	26
4 Ketenagakerjaan	35
5 Pola Konsumsi	44
6 Perumahan dan Lingkungan	53
7 Sosial Lainnya	60
Lampiran	67
Daftar Pustaka	92
Istilah Teknis	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Komposisi Penduduk (%) dan Rasio Ketergantungan di Kota Ternate, 2011-2014	6
1.2 Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Usia pada Perkawinan Pertama di Kota Ternate, 2012-2014	9
1.3 Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Jumlah Anak Lahir Hidup di Kota Ternate, 2012-2014	10
2.1 Persentase Penduduk menurut Jenis Keluhan Kesehatan yang Dialami (%) dan Rata-Rata Lamanya Sakit (Hari) di Kota Ternate, 2013-2014	18
2.2 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2013-2014	24
3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Ternate, 2013-2014	32
4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama selama Seminggu yang Lalu di Kota Kota Ternate, 2012-2014	37
4.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama, 2012-2014.....	40
4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Ternate, 2012-2014.....	41

4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja selama Seminggu di Kota Ternate, 2012-2014	42
5.1 Angka Kemiskinan di Kota Ternate, 2012-2014	47
5.2 Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Ternate, 2012-2014	49
5.3 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ternate, 2014	51
6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Ternate, 2012-2014	55
6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kota Ternate, 2012-2014	56
6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kota Ternate, 2012-2014	57
6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan yang Ditempati, 2013-2014.....	59
7.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan menurut Tujuan Utama di Kota Ternate, 2013-2014	62
7.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kota Ternate, 2013-2014	64
7.3 Beberapa Indikator Raskin di Kota Ternate, 2013-2014	65
7.4 Beberapa Indikator Korban Kejahatan di Kota Ternate, 2013-2014	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Kota Ternate, 2010-2014	3
1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara (Persen), 2011-2014	4
1.3 Persentase Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di Kota Ternate, 2014	5
1.4 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Apakah sedang menggunakan Alat/ Cara KB, 2012-2014.....	11
1.5 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Tidak sedang Menggunakan/ Memakai ALat/ Cara KB dan Apakah masih ingin Mempunyai Anak, 2013-2014.....	12
1.6 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Tidak sedang ber-KB serta Tidak Ingin segera Punya Anak dan Alasannya tidak ber-KB, 2013-2014	13
1.7 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan sedang Menggunakan Alat /Cara KB menurut Jenis Alat/ Cara KB yang sedang Digunakan di Kota Ternate, 2014.....	14
2.1 Persentase Penduduk menurut Apakah mempunyai Keluhan Kesehatan di Kota Ternate, 2012-2014	17
2.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Cara Berobat (Berobat Sendiri dan Berobat Jalan) di Kota Ternate, 2013-2014	20

2.3	Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan, 2013-2014	20
2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/ Cara Berobat, 2013-2014.....	21
2.5	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Ternate, 2013-2014	22
2.6	Persentase Balita Umur 2-4 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Lama Pemberian ASI, 2013-2014	23
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2013-2014	29
3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 5-24 Tahun di Kota Ternate, 2014	30
3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2014.....	34
5.1	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ternate, 2012-2014	50
5.2	Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Ternate, 2012-2014	52
7.1	Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan menurut Provinsi Tujuan Utama di Kota Ternate, 2014	63

SINGKATAN DAN AKRONIM

APK/GER	Angka Partisipasi Kasar/Gross Enrollment Ratio
APM/NER	Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	Diploma 1/ Diploma 2 / Diploma3
Lk	Laki-laki
Lk + Pr	Laki-laki + Perempuan
Pr	Perempuan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
MI	Madrasah Ibtidaiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
Wajar	Wajib Belajar



Kependudukan

<http://ternateko.comps.go.id>

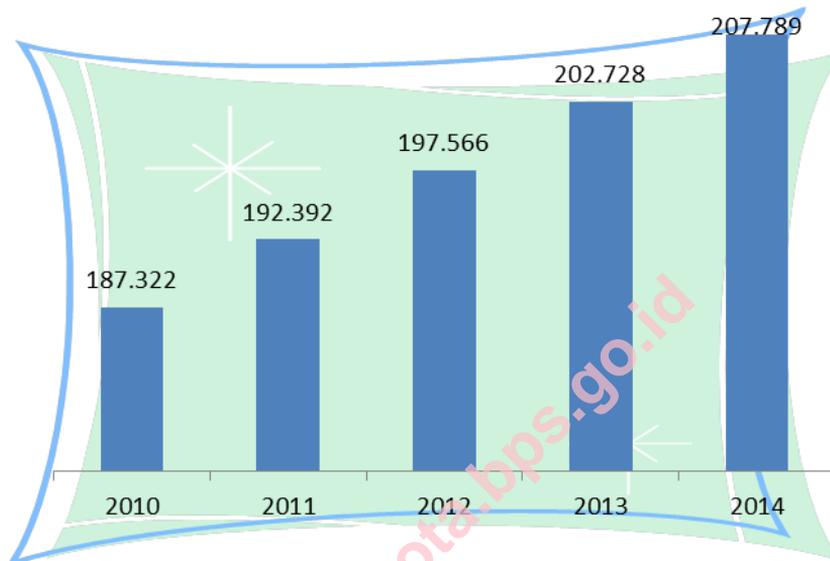
Kependudukan

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Di satu sisi, penduduk merupakan pelaku pembangunan, di sisi lain sasaran dan tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah kependudukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Ternate dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Ternate pada 2010 sebanyak 187.322 jiwa. Sementara pada 2011, 2012 dan 2013 meningkat menjadi 192.392 jiwa, 197.566 jiwa dan 202.728 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Ternate sebanyak 207.789 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Kota Ternate dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kota Ternate, 2010-2014



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2015

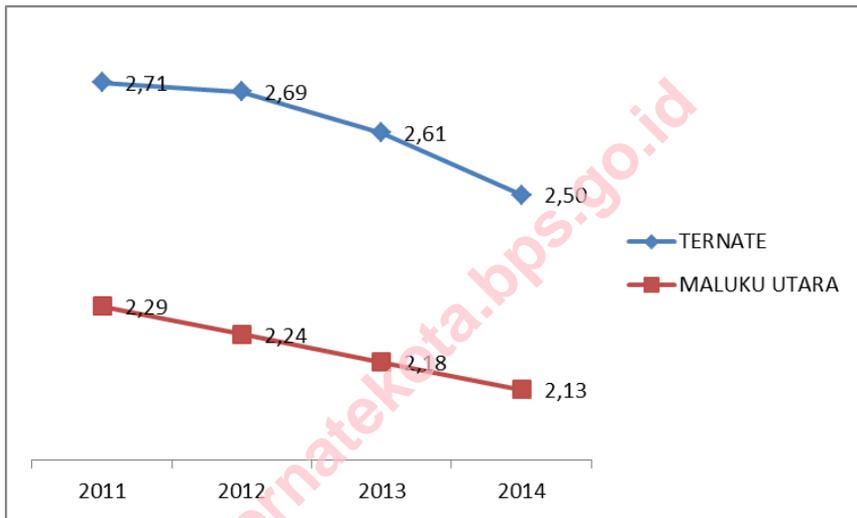
Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah serius, mengancam ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan, pengangguran hingga kriminalitas. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Maluku Utara, Kota Ternate menduduki peringkat ke-2 jumlah penduduk terbesar di Maluku Utara, sesudah Kabupaten Halmahera Selatan. Perbandingan jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Maluku Utara selama lima tahun terakhir, selengkapnya disajikan pada Tabel A1.

Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk Kota Ternate terus menurun selama empat tahun terakhir. Namun, besaran laju

tersebut masih di atas laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara (Grafik 1.2).

Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara (Persen), 2011-2014



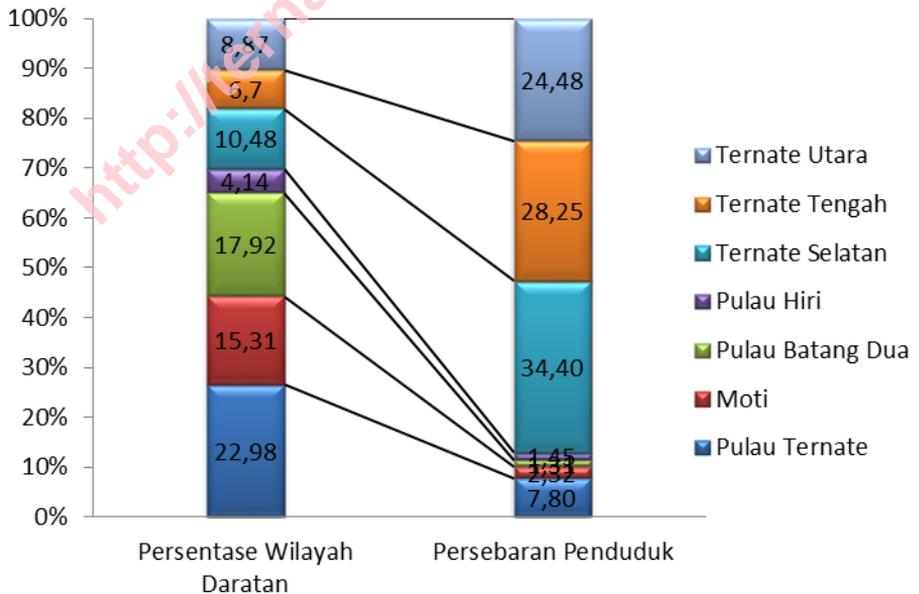
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2015

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Ternate kemungkinan besar lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan migrasi. Sedangkan pertumbuhan alami penduduk sesungguhnya sudah cukup terkendali. Hal ini tergambar dari nilai TFR Kota Ternate yang cenderung lebih rendah dibandingkan kabupaten kota lain di Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate notabene merupakan pusat perdagangan, industri, pendidikan dan kesehatan di provinsi ini, sehingga sangat wajar banyaknya pendatang sangat sulit dibendung untuk mengurangi laju pertumbuhan tersebut.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Selain jumlah penduduk yang cukup besar, Kota Ternate masih mengalami sejumlah masalah demografi lainnya, antara lain persebaran penduduk antar kecamatan yang masih timpang. Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Ternate Selatan yang memiliki luas wilayah 8,87 persen, 6,7 persen dan 10,48 persen dari total wilayah Kota Ternate dihuni sebanyak 24,48 persen, 28,25 persen dan 34,40 persen dari total penduduk Kota Ternate. Dominasi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi membuat penduduk terkonsentrasi di wilayah ini. Pola persebaran penduduk di Kota Ternate disajikan pada Grafik 1.3.

Grafik 1.3 Persentase Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di Kota Ternate, 2014



*) 13.61 persen wilayah daratan Kota Ternate berupa hutan lindung

Sumber: BPS, Kota Ternate Dalam Angka 2015 (diolah)

Persebaran penduduk yang masih timpang di Kota Ternate menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan tidak merata. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi secara berturut-turut yaitu Kecamatan Ternate Tengah sebesar 5409 jiwa per km², Kecamatan Ternate Selatan sebesar 4209 jiwa per km² dan Kecamatan Ternate Utara sebesar 3538 jiwa per km². Sementara ke empat kecamatan lainnya kepadatan penduduknya masih kurang dari 500 jiwa per km². Informasi kepadatan penduduk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel A2.

Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Jumlah penduduk yang besar tidak akan terlalu menjadi masalah ketika rasio ketergantungannya relatif kecil. Artinya, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) cenderung lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Ketika rasio ketergantungan ini kecil, diharapkan penduduk usia produktif akan mempunyai lebih banyak kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban tanggungan atas usia tidak produktif.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk (%) dan Rasio Ketergantungan di Kota Ternate, 2011-2014

Uraian	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Komposisi Penduduk (Persen)	0-14 Tahun	28,19	28,20	28,20	28,20
	15-64 Tahun	69,22	69,21	69,21	69,21
	65+ Tahun	2,59	2,59	2,59	2,59
Rasio Ketergantungan	44,46	44,47	44,48	44,48	

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2015

Terlihat, sejak beberapa tahun lalu struktur umur penduduk Kota Ternate lebih didominasi penduduk usia produktif yang besarnya mencapai hampir 70 persen. Kondisi ini berimplikasi pada cukup rendahnya rasio ketergantungan, yaitu sebesar 44,48 pada tahun 2014. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif *hanya* menanggung beban 45 penduduk usia tidak produktif. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan rasio ketergantungan Provinsi Maluku Utara yang sebesar 59,67.

Rasio Ketergantungan yang relatif kecil ini dikenal dengan istilah bonus demografi (*demographic gift*). Dalam kenyataannya, bonus ini tidak selalu membawa sisi positif bagi wilayah yang menerimanya. Membludaknya usia produktif memang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi yang potensial sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, usia produktif yang besar jika tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup juga akan menimbulkan masalah, pengangguran dan kemiskinan yang akhirnya berujung pada tingginya angka kriminalitas. Untuk itu, perlu tindakan preventif

dari pemerintah tidak hanya upaya penyediaan lapangan kerja tapi juga peningkatan kualitas SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, diharapkan penduduk usia produktif tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga menjadi penyedia lapangan kerja itu sendiri. Di sisi lain, bonus demografi ini juga menjadi indikator penurunan fertilitas dan angka kematian bayi secara jangka panjang.

Bonus demografi ini sejatinya tidak akan berlangsung terus menerus. Nantinya, tiga atau empat dekade ke depan, rasio ketergantungan akan kembali tinggi dikarenakan usia produktif saat ini sudah mulai memasuki usia lansia. Karenanya, sangat penting kiranya memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya.

Tanda-tanda akan berakhirnya bonus demografi juga terlihat dari angka beban ketergantungan yang mulai menaik dari tahun ke tahun. Dikhawatirkan, jika tidak ada tindakan positif dalam memanfaatkan bonus demografi ini, momen ini akan terlewatkan begitu saja.

Rasio ketergantungan untuk kabupaten/kota lain se-Maluku Utara dapat dilihat pada lampiran Tabel A3.

Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu “variabel antara” yang berpengaruh langsung terhadap fertilitas. Hal ini dikarenakan pada saat perkawinan pertama, secara formal seorang wanita diasumsikan akan memasuki kehidupan seksual, yang

berarti pula dimulainya masa menghadapi resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama seorang wanita, maka masa reproduksinya juga semakin panjang.

Usia ideal seorang wanita menikah adalah di atas 20 tahun (BKKBN, 2013). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014, ada 59.45 persen wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun, dan hanya 2.47 persen wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Ini menjadi indikasi penting bahwa kesadaran masyarakat untuk menunda pernikahan pada usia dini sudah semakin tinggi.

Tabel 1.2 Persentase Wanita Usia 10 tahun ke Atas yang pernah Kawin menurut Usia pada Perkawinan Pertama di Kota Ternate, 2012-2014

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				
	<= 15	16	17 - 18	19 - 24	25 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	2,48	5,20	19,43	53,00	19,89
2013	3,50	5,21	17,14	55,90	18,24
2014	2,47	5,18	16,33	59,45	16,57

Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Terlihat, dari tahun ke tahun semakin banyak wanita yang usia kawin pertamanya di rentang 19 sampai dengan 24 tahun dan semakin sedikit wanita yang menikah di usia dini. Bila dilihat menurut kabupaten/kota seperti tercantum pada lampiran Tabel A4, pada 2014, kasus wanita yang melakukan perkawinan

pertama di usia kurang dari 16 tahun banyak terjadi di Kabupaten Halmahera Timur (8.71 persen) dan Kabupaten Kepulauan Sula (7.94 persen). Informasi lengkap untuk kabupaten/kota lainnya lihat tabel.

Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas merupakan kemampuan alami seorang wanita untuk berreproduksi. Indikator yang biasa digunakan adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) dan Anak Lahir Hidup (ALH).

Tabel 1.3 Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Jumlah Anak Lahir Hidup di Kota Ternate, 2012-2014

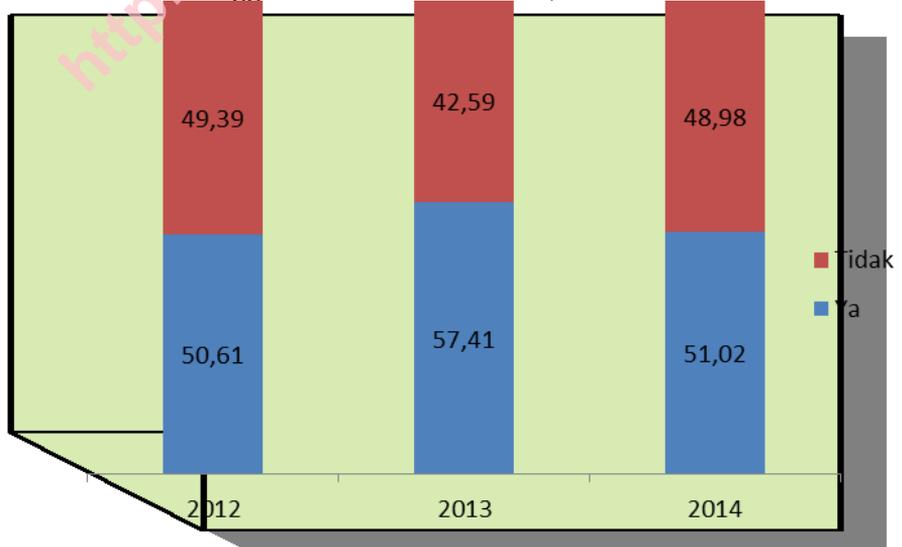
ALH	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
0	5,87	5,80	7,04
1	20,10	20,17	20,57
2	25,14	26,58	27,38
3	17,36	19,93	17,24
4	15,14	13,07	14,40
5	8,89	6,85	5,32
6	2,82	2,70	3,09
7	1,15	2,12	3,17
8	0,73	2,11	0,57
9	2,29	0,11	0,60
10+	0,51	0,57	0,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Selama tiga tahun terakhir, mayoritas wanita pernah kawin di Kota Ternate melahirkan anak sebanyak satu sampai dengan empat anak. Hanya sedikit yang melahirkan anak lahir hidup di atas empat orang. Persentase terbanyak melahirkan anak lahir hidup sebanyak dua orang. Hal ini menjadi indikasi awal keberhasilan program pemerintah di bidang pengendalian jumlah penduduk di mana diprogramkan satu keluarga cukup memiliki anak maksimal dua orang.

Salah satu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah dengan program Keluarga Berencana (KB). Dengan keluarga berencana, diharapkan jumlah kelahiran dan jarak antar kelahiran bisa lebih direncanakan. Salah satu cara dalam program tersebut adalah penggunaan alat kontrasepsi.

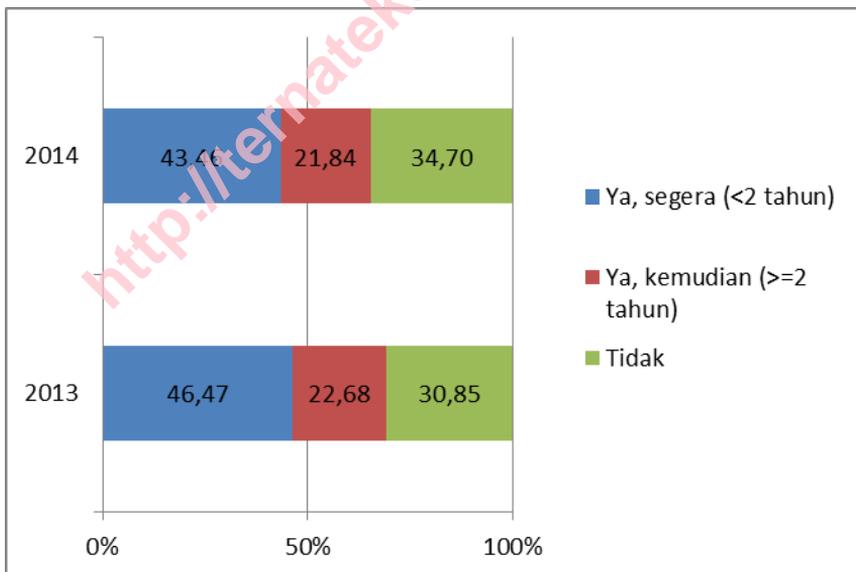
Grafik 1.4 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Apakah sedang Menggunakan Alat/ Cara KB, 2012-2014



Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Grafik 1.4 menunjukkan bahwa persentase wanita yang menggunakan alat/cara KB cenderung stagnan di posisi 50an persen. Sempat naik cukup tinggi pada tahun 2013 sebanyak 57.41 persen namun kembali ke 51.02 persen pada tahun 2014. Responden yang menjawab tidak di sini mencakup yang sama sekali tidak pernah ber-KB ataupun yang pernah ber-KB dan sekarang sudah tidak memakai KB lagi.

Grafik 1.5 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Tidak Sedang Menggunakan/ Memakai Alat/Cara KB dan Apakah Masih Ingin Mempunyai Anak, 2013-2014

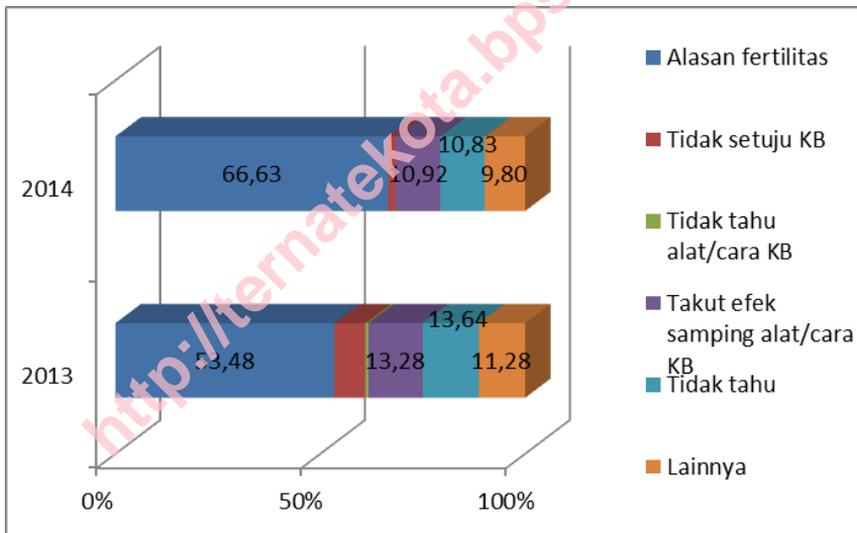


Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Tahun 2014, dari keseluruhan wanita yang tidak menggunakan alat/cara KB, 21.84 persen menyatakan masih ingin mempunyai anak kemudian hari (≥ 2 tahun) dan 34.70 persen

menyatakan tidak ingin mempunyai anak lagi. Lantas, apa penyebab para wanita ini enggan menggunakan alat KB meskipun masih ingin menunda kehamilan bahkan tidak ingin hamil lagi? Berikut tersaji grafiknya.

Grafik 1.6 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Tidak Sedang ber-KB serta Tidak Ingin Segera Punya Anak dan Alasannya Tidak ber-KB, 2013-2014



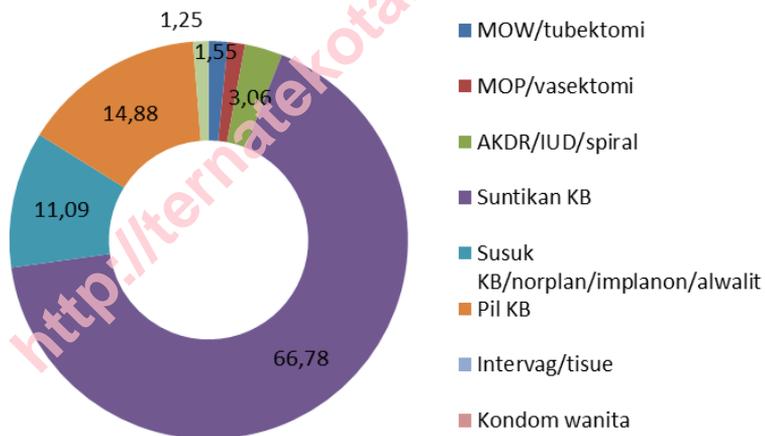
Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Ternyata, sebagian besar wanita yang tidak ber-KB meskipun tidak ingin segera mempunyai anak beralasan karena fertilitas. Fertilitas di sini mencakup mereka yang jarang kumpul, puasa kumpul (suami dan istri terpisah tempat tinggal/ jarang bertemu), menopause, tidak dapat hamil, baru melahirkan ataupun sedang menyusui. Alasan terbanyak kedua adalah takut efek samping alat/ cara KB. Hal ini terkait dengan masalah kesehatan

seperti pusing, menjadi gemuk/kurus, menstruasi terus menerus, tidak menstruasi sama sekali, migrain, dan sebagainya.

Salah satu cara menghindari efek samping yang berlebihan adalah dengan memilih alat/cara KB yang paling cocok bagi masing-masing wanita. Lantas, alat/cara KB apakah yang paling banyak digunakan di Kota Ternate? Berikut ulasannya.

Grafik 1.7 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kota Ternate, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Mayoritas wanita masih memilih suntikan KB sebagai alat kontrasepsinya. Ini tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya di mana suntikan KB merupakan metode KB terfavorit. Metode kedua yang paling banyak digunakan adalah pil KB.



Kesehatan

Kesehatan

Sehat adalah suatu kondisi fisik yang lengkap, sehat mental, tercapainya kesejahteraan sosial dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan (WHO, 1948). Terkait dengan ketersediaan data, maka pada bab ini pembahasan akan dibatasi pada kesehatan fisik saja.

Kesehatan merupakan bagian dari indikator kesejahteraan rakyat dalam hal kualitas fisik dimana angka harapan hidup dan kematian bayi sebagai indikator utamanya. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

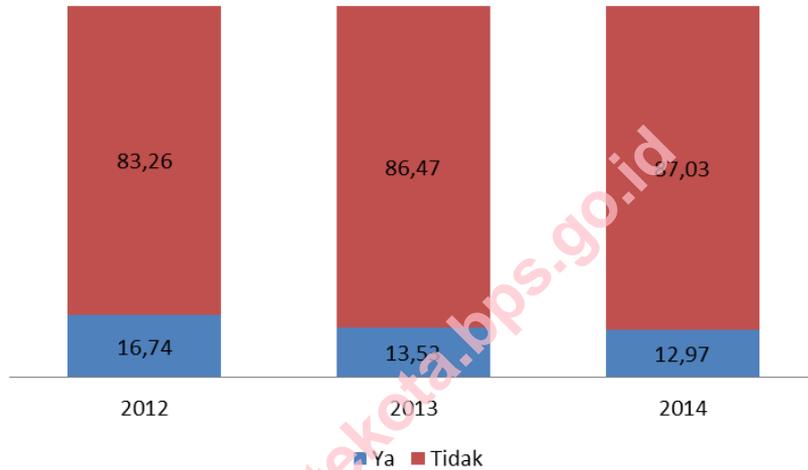
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memelihara mutu pelayanan kesehatan. Diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku sehat, penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin desa, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan serta penyediaan fasilitas air minum bersih.

Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Referensi waktu yang

digunakan dalam susenas adalah sebulan yang lalu.

Grafik 2.1 Persentase Penduduk menurut Apakah Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kota Ternate, 2012-2014



Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Tampak, dari tahun ke tahun masyarakat Kota Ternate yang mengalami keluhan kesehatan semakin berkurang, dari 16.74 persen pada tahun 2012 turun menjadi 12.97 persen pada tahun 2014. Gambaran ini cukup baik mengingat untuk Provinsi Maluku Utara ada 15.70 persen masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan (lampiran Tabel B1).

Dari sekian banyak keluhan kesehatan yang dialami masyarakat, tiga jenis yang paling umum adalah panas, batuk dan pilek. Hal ini disebabkan hampir semua gejala awal suatu penyakit ditandai dengan keluhan ini. Panas, batuk dan pilek ini nantinya ketika sudah diobservasi oleh tenaga kesehatan akan menyimpulkan jenis penyakitnya, apakah malaria, TBC, demam berdarah, infeksi tenggorokan dan sebagainya. Data juga

menunjukkan keluhan lainnya cukup besar. Keluhan ini mencakup sakit kepala biasa, nyeri setelah operasi, stroke, lumpuh, maag, sakit mata, mual termasuk juga keluhan kesehatan karena menstruasi, hamil ataupun melahirkan.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Keluhan Kesehatan yang Dialami (Persen) dan Rata-rata Lamanya Sakit (Hari) di Kota Ternate, 2013-2014

Jenis Keluhan Kesehatan	2013	2014
(1)	(3)	(4)
Panas	38.24	37.54
Batuk	30.30	25.28
Pilek	24.41	22.77
Asma/ Napas Sesak/ Cepat	2.89	2.07
Diare/buang air	2.50	3.34
Sakit Kepala Berulang	9.07	9.73
Sakit Gigi	1.89	1.66
Lainnya	41.38	43.37
Rata-rata Lama Sakit (hari)	4.05	4.57

Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Dari sisi lamanya hari sakit, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014, yakni dari 4.05 hari menjadi 4.57 hari. Dapat disimpulkan bahwa selama setahun terakhir terjadi penurunan persentase masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan namun dari sekian masyarakat yang

mengalami keluhan kesehatan justru semakin lama hari sakitnya.

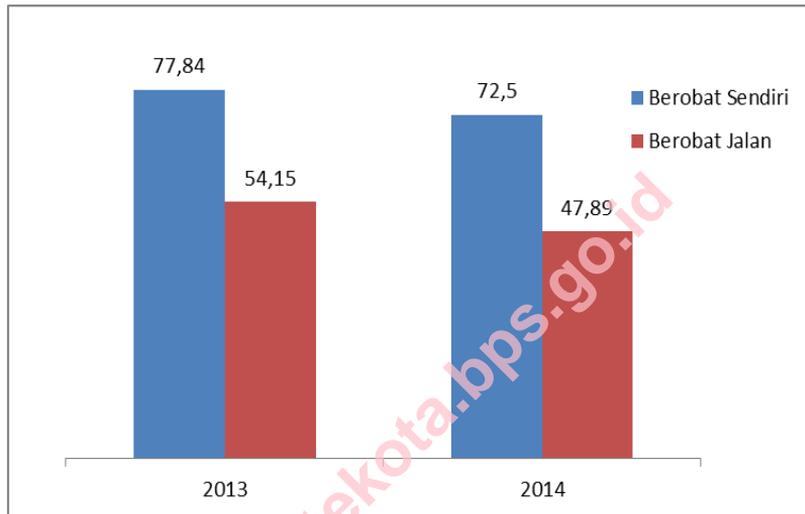
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk. Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskeskel dan polindes merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok wilayah.

Selain peningkatan fasilitas kesehatan, yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya tenaga medis khususnya tenaga penolong persalinan yang memadai baik jumlah, keahlian, maupun keterjangkauannya. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkannya.

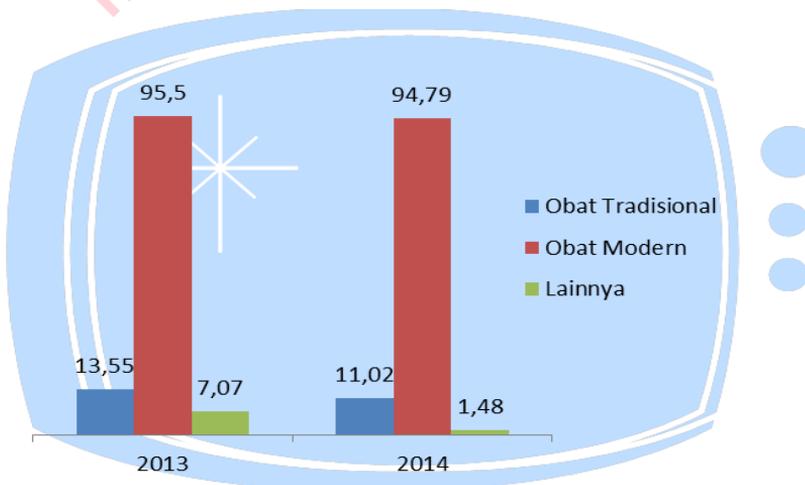
Terkait kesadaran masyarakat terhadap tata cara pengobatan yang aman, hasil Susenas menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan ternyata masih lebih banyak yang memilih untuk mengobati sendiri daripada yang melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan (grafik 2.2). Hal ini disebabkan berbagai alasan, seperti tidak merasa perlu ke dokter karena keluhannya dianggap biasa-biasa saja, karena letak tempat periksa yang jauh, takut ke dokter atau kendala biaya baik biaya berobat maupun biaya transport.

Grafik 2.2 Persentase Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan menurut Cara Berobat (Berobat Sendiri dan Berobat Jalan) di Kota Ternate, 2013-2014



Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Grafik 2.3 Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan, 2013-2014

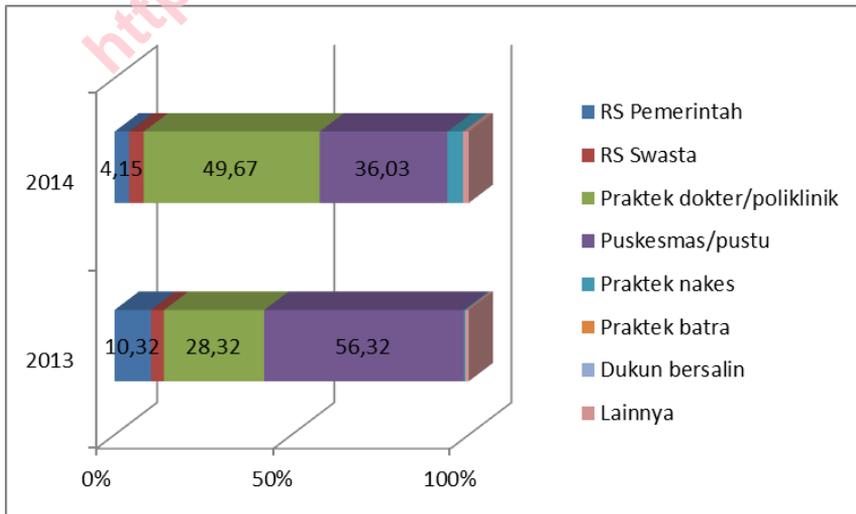


Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Grafik 2.3 menyajikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat yang berobat sendiri cenderung membeli obat-obat modern dibandingkan obat-obatan tradisional ataupun lainnya (bahan makanan suplemen/pelengkap alami/minuman tonik/pijat dan kerok). Pola yang sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara seperti terlihat pada lampiran Tabel B2.

Dari sisi tempat berobat, terjadi perubahan kecenderungan masyarakat di mana pada tahun 2013 fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi adalah puskesmas/pustu pada tahun 2014 bergeser ke praktek dokter/poliklinik. Gambaran untuk kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada lampiran Tabel B3.

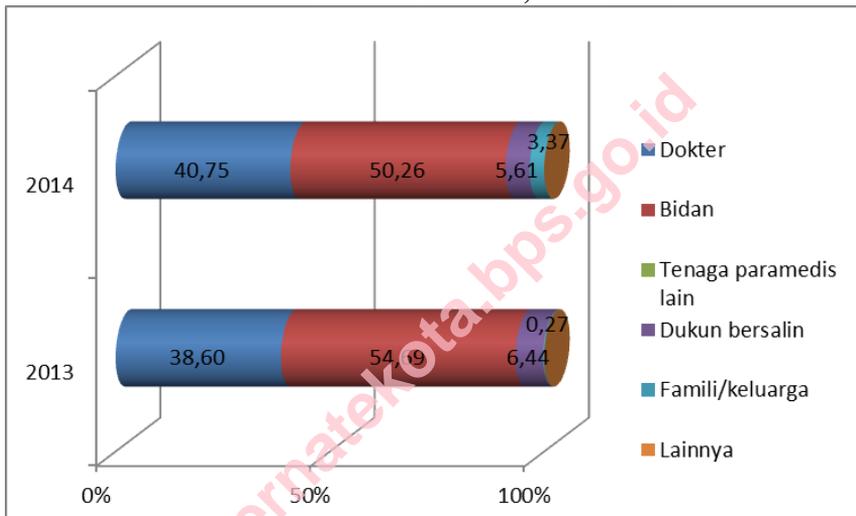
Grafik 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/ Cara Berobat, 2013-2014



Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi, penolong persalinan tentu diharapkan orang yang ahli di bidangnya.

Grafik 2.5 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Ternate, 2013-2014



Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Hasil Susenas menunjukkan penolong kelahiran terakhir di tahun 2013-2014 didominasi oleh para tenaga medis di mana di tahun 2014 ada 50.26 persen kelahiran ditolong oleh bidan dan 40.75 persen lainnya ditolong oleh dokter. Hanya sebagian kecil yang ditolong oleh dukun bersalin dan famili/keluarga, masing-masing sebesar 5.61 persen dan 3.37 persen. Diharapkan, semakin tinggi persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, maka angka kematian ibu dan bayi akan semakin kecil.

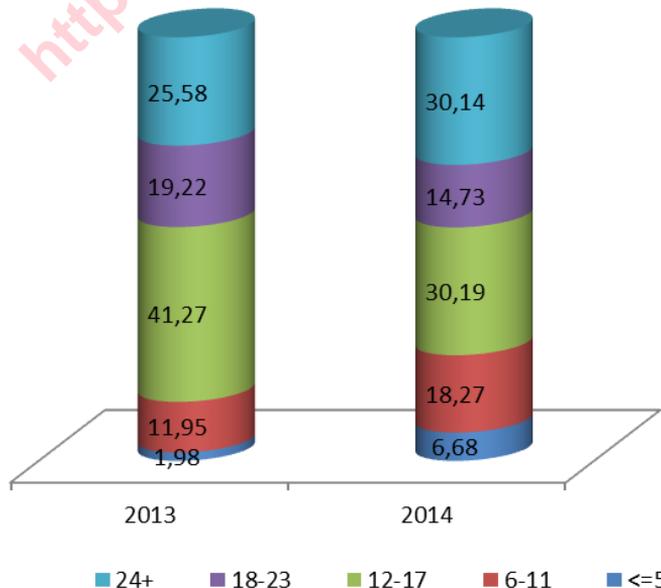
Untuk melihat potret penolong persalinan di kabupaten/kota lain, data selengkapnya disajikan pada lampiran Tabel B4.

Pemberian ASI dan Imunisasi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan tanpa tanding karunia Sang Pencipta yang merupakan nutrisi terbaik bagi seorang bayi. ASI mengandung segala nutrisi yang dibutuhkan bayi, hormon, zat kekebalan, anti alergi dan anti inflamasi. Kandungan dalam ASI selalu berada dalam jumlah dan komposisi yang tepat bagi bayi. Oleh karenanya, semakin lama bayi disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan, perkembangan dan kesehatannya.

Penyajian data ASI hanya untuk balita berumur 2-4 tahun dimaksudkan agar gambaran yang diperoleh tentang praktek pemberian ASI tidak bias atau *underestimate*.

Grafik 2.6 Persentase Balita Umur 2-4 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Lama Pemberian ASI, 2013-2014



Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Rata-rata lama pemberian ASI anak-anak Kota Ternate dari populasi anak berumur 2-4 tahun yang pernah diberi ASI pada 2014 terlihat bahwa mayoritas bayi mendapatkan ASI hingga usia 12-17 bulan (1 hingga 1,5 tahun). Terjadi peningkatan persentase bayi yang disusui ASI lebih dari 24 bulan selama 2013-2014 yaitu dari 25.58 persen menjadi 30.14 persen. Di sisi lain, terjadi kenaikan pula untuk bayi yang disusui kurang dari 6 bulan yaitu dari 1.98 persen menjadi 6.68 persen.

Tabel 2.2 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2013-2014

Tahun	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	98.50	96.10	92.11	86.33	91.28
2014	97.06	92.30	92.66	83.49	89.43

Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Selain kekebalan yang dimiliki sejak dalam kandungan, bayi juga memerlukan kekebalan buatan yang diperoleh melalui imunisasi. Imunisasi bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pada umur satu tahun, bayi semestinya telah diimunisasi secara lengkap, yaitu satu kali BCG dan campak, tiga kali DPT, Hepatitis B dan polio. Di samping itu masih terdapat imunisasi lain yang tidak wajib namun sebaiknya juga diberikan

kepada bayi seperti HiB dan PRP-OMP untuk usia 2 bulan atau lebih, serta imunisasi yang lainnya.

Dari hasil Susenas 2014 menunjukkan, persentase balita yang telah diimunisasi lengkap sebesar 93.52 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 94,42 persen. Angka ini menempati urutan kedua setelah Kota Tidore Kepulauan yang sebesar 96.40 persen. Persentase imunisasi lengkap terkecil terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula yang hanya mencapai 31.94 persen (lampiran Tabel B5).

Pendidikan

Pendidikan

Kita semua sepakat bahwa pendidikan mempunyai peran besar dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negaranya. Pembangunan pendidikan juga mempunyai *multiplier effect* pada pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Bisa dikatakan, pendidikan merupakan modal pada berbagai dimensi kehidupan lainnya.

Diharapkan, pendidikan di negeri ini semakin berkualitas dari waktu ke waktu, di mana kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di bidang pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, antara lain anggaran pendidikan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana, kualitas kurikulum hingga pemerataan pendidikan, yang dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan pendidikan bagi setiap penduduk usia sekolah secara berkualitas dan relevan dengan pembangunan dan dikelola secara efisien. Pemerataan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti pembangunan gedung sekolah, gedung laboratorium, gedung perpustakaan dan tambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep “link and match”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah

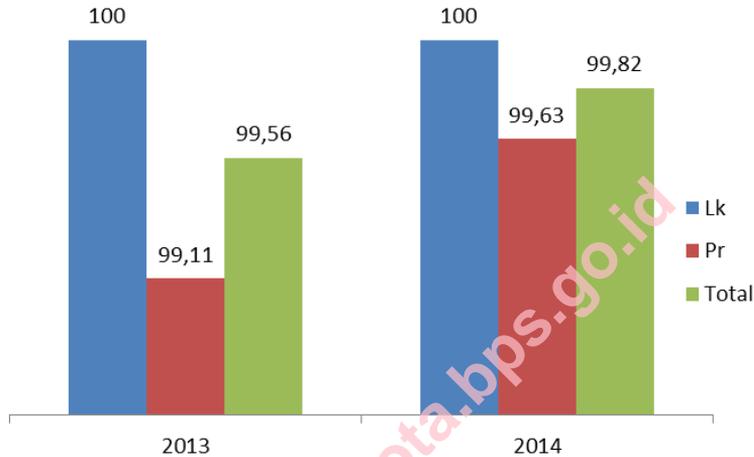
menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara umum diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat yang berhasil dicapai selama periode waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator bidang pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), tingkat/jenjang pendidikan yang ditamatkan, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator sederhana yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Melek huruf menggambarkan suatu potensi untuk pertumbuhan intelektual lebih lanjut dan kontribusi pada pengembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat. Semakin besar angka melek huruf orang dewasa, berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis. Angka melek huruf yang dibahas dalam bab ini adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Grafik 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2013-2014



Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

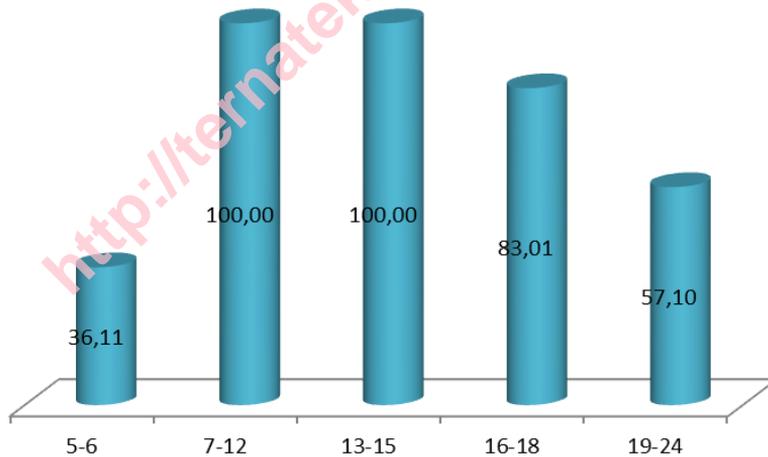
AMH Kota Ternate sudah cukup baik, mencapai 99.82 persen pada tahun 2014 di mana AMH laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, masing-masing sebesar 100 persen dan 99.63 persen. AMH ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 99.56 persen. Program-program dan anggaran pemerintah di sektor pendidikan selalu dipacu setiap tahun. BLSM dan dana BOS yang dikucurkan dalam rangka mengurangi beban biaya pendidikan sudah selayaknya mampu memberantas buta huruf di kota ini. AMH saja tidak cukup membuat kita berbangga hati, karena sesungguhnya secara nasionalpun AMH ini sudah mencapai level maksimal. Sudah saatnya kita beralih ke target-target pendidikan lainnya seperti meminimalisir angka putus sekolah, meningkatkan persentase penduduk yang lulusan sarjana minimal diploma dan sebagainya. Dengan tingkat pendidikan

yang semakin tinggi diharapkan pola pikir masyarakat semakin maju. Gambaran AMH Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada lampiran Tabel C1.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS menunjukkan persentase penduduk usia tertentu yang masih bersekolah dibandingkan dengan total penduduk usia dimaksud. Dengan APS kita bisa mengetahui status partisipasi sekolah dari masing-masing kelompok usia.

Grafik 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 5-24 Tahun di Kota Ternate, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Dari seluruh penduduk usia 7-15 tahun, semua berstatus masih bersekolah pada tahun 2014. APS mulai menurun pada usia-usia SMA yaitu 16-18 tahun yang hanya 83,01 persen penduduk yang berstatus masih bersekolah. Sisanya berstatus sudah tidak bersekolah lagi. Bisa disimpulkan bahwa masih cukup

banyak siswa yang putus sekolah di rentang usia ini. Di sisi lain, cukup banyak siswa yang masuk sekolah di usia dini. Ada 36.11 persen penduduk usia 5-6 tahun yang sudah masuk Sekolah Dasar.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun.

APM umumnya digunakan untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Jika APM mencapai 100 persen artinya semua anak usia sekolah telah bersekolah tepat waktu. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Ternate, 2013-2014

Jenis Kelamin/ Jenjang Pendidikan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki		
SD	91.70	93.48
SMP	87.23	89.60
SMA	62.01	64.14
Perempuan		
SD	88.88	91.12
SMP	64.03	67.11
SMA	67.39	66.56
Laki-Laki + Perempuan		
SD	90.41	92.13
SMP	76.89	78.47
SMA	65.10	65.39

Sumber: BPS, Susenas 2013-2014

Tabel 3.2 menunjukkan murid yang bersekolah tepat waktu lebih banyak pada jenjang SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan, APMnya cenderung mengecil.

Selain itu, jika dilihat menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa pada jenjang SD dan SMP APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sementara pada jenjang pendidikan SMA, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pendidikan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan pencanangan program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun. Keberhasilan program Wajar Sembilan Tahun dapat diketahui melalui indikator rata-rata lama sekolah. Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui lama tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di bangku sekolah formal yang pernah dijaani atau diikuti.

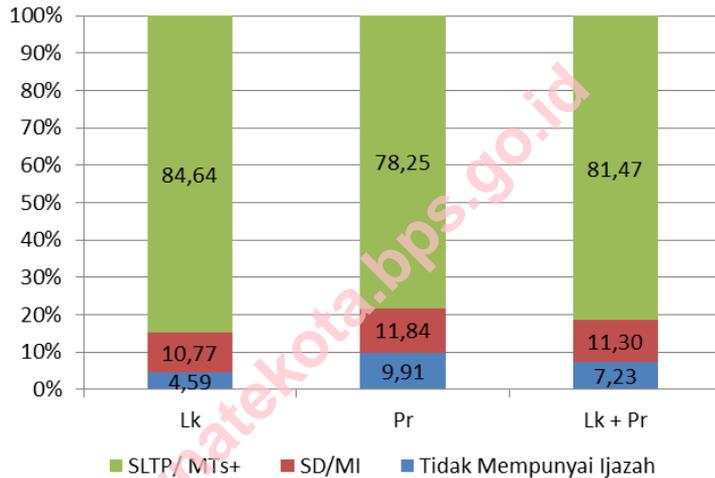
Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Ternate usia 25 tahun ke atas pada tahun 2014 sebesar 11,11 tahun (lampiran Tabel C2). Hal ini berarti rata-rata pendidikan penduduk *hanya* sampai kelas 2 SMA. Pencapaian angka ini lebih baik daripada rata-rata lama sekolah penduduk pada dua tahun sebelumnya yang sebesar 10.58 tahun pada 2012 dan 11.06 tahun pada 2013. Dapat disimpulkan, program wajar sembilan tahun atau target pendidikan dasar minimal 9 tahun telah tercapai di Kota Ternate. Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota yang mencapai wajar 9 tahun.

Data lengkap untuk kabupaten/kota lain di Maluku Utara, disajikan pada Tabel C2.

Selain rata-rata lama sekolah, data ijazah tertinggi yang dimiliki dapat digunakan sebagai indikator pencapaian program wajar sembilan tahun. Program wajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah mengharapkan semua penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun telah mengenyam pendidikan dasar (minimal menamatkan SMP). Dalam publikasi

ini indikator tersebut dilihat dari persentase penduduk yang memiliki ijazah minimal SMP yang ditulis dengan SLTP/MTs+.

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2014



Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa pencapaian program wajar sembilan tahun di Kota Ternate baru mencapai 81,47 persen. Masih ada 11,30 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang *cuma* lulus SD/ sederajat, bahkan ada 7,23 persen yang tidak memiliki ijazah, dalam arti tidak/ belum pernah bersekolah, ataupun yang tidak tamat SD. Porsi ini kemungkinan ditempati oleh penduduk lansia yang belum pernah mengenyam pendidikan atau pernah duduk di bangku sekolah namun tidak tamat.



Ketenagakerjaan

<http://ternatekomps.go.id>

Ketenagakerjaan

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yakni penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja secara memadai untuk dapat hidup dengan layak. Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Bab berikut menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan terkini di Kota Ternate. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2012 sampai dengan 2014.

Secara Umum, keadaan ketenagakerjaan di Kota Ternate selama 2012-2014 disajikan pada Tabel 4.1. Penduduk yang bekerja pada 2012 tercatat sebanyak 74259 orang, meningkat menjadi 85232 orang pada 2014. Penduduk yang menganggur juga meningkat dari 6260 pada tahun 2012 menjadi 8147 pada tahun 2014. Sedangkan pada kelompok penduduk bukan angkatan kerja, peningkatan cukup tinggi terjadi pada penduduk yang

bersekolah, yaitu dari 8766 orang pada 2012 menjadi 29925 orang pada 2013 dan sedikit menurun menjadi 25210 orang pada 2014.

Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama selama Seminggu yang Lalu di Kota Ternate, 2012-2014

Kegiatan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	80519	81109	93379
Bekerja	74259	77271	85232
Pengangguran	6260	3838	8147
Bukan Angkatan Kerja	61569	65026	56881
Sekolah	8766	29925	25210
Mengurus Rumah Tangga	43875	28774	25222
Lainnya*)	8928	6327	6449
Usia Kerja	142088	146135	150260
TPAK	56.67	55.50	62.14
TPT	7.77	4.73	8.72

*) Lainnya adalah kegiatan selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup di sini adalah kegiatan yang bersifat aktif seperti; olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan

Sumber: BPS, Sakernas 2012-2014

Pada kelompok penduduk angkatan kerja tahun 2014 di Kota Ternate, penduduk yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menganggur. Sedangkan pada kelompok bukan angkatan kerja pada tahun yang sama, antara yang sekolah dan yang mengurus rumah tangga cenderung berimbang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK pada 2014 tercatat sebesar 62.14 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar 62 orang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan pengangguran), 38 orang sisanya sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Angka ini lebih tinggi dibanding 2012 dan 2013 yang mencapai 56.67 persen dan 55.50 persen.

Selama tiga tahun terakhir, TPAK Kota Ternate selalu berada di bawah rata-rata TPAK Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan pada usia 15 tahun ke atas penduduk Kota Ternate masih banyak yang bersekolah dan belum masuk kategori angkatan kerja. Hal ini berbeda dengan wilayah lain di Maluku Utara, terutama di pedesaan di mana banyak yang tidak melanjutkan pendidikan dan masuk pasar angkatan kerja. Data selengkapnya disajikan pada Tabel D1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT di Kota Ternate selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Di tahun 2012, TPT Kota Ternate sebesar

7.77 persen, turun menjadi 4.73 persen pada 2013 dan naik kembali pada tahun 2014 menjadi 8.72 persen. TPT sebesar 8.72 persen berarti dari 100 angkatan kerja, sekitar 9 orang di antaranya menganggur, sedangkan 91 orang lainnya bekerja.

Tingkat pengangguran sangat berkorelasi dengan kesempatan kerja yang tersedia di daerah. Jika kesempatan kerja mengalami peningkatan, maka tenaga kerja yang terserap juga akan semakin banyak, tentunya hal ini dapat menekan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan lapangan kerja akan mempermudah akses untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari pendapatan yang diperoleh.

Hal penting lainnya yaitu perlu adanya perubahan *mindset*, di mana pemikiran masyarakat yang pada umumnya hanya mencari kerja, diubah menjadi menciptakan lapangan kerja. Perlu digalakkan dan disosialisasikan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) secara lebih luas, kemudahan usaha kecil terhadap akses perbankan, kemudahan pinjaman modal untuk para pendatang di dunia kerja, pendampingan usaha, dan sebagainya. Perlu pula penyadaran masyarakat untuk tidak menggantungkan hidupnya pada status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja melalui rekrutmen PNS di sisi lain hanya akan menambah beban keuangan negara.

Lapangan Kerja dan Status Pekerjaan

Salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja adalah komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Selain itu, indikator tersebut juga mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama, 2012-2014

Lapangan Usaha Utama	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	11.00	9.94	6.79
Industri	10.82	8.68	14.69
Jasa	78.18	81.38	78.52

Sumber: BPS, Sakernas 2012-2014

- Catatan :
- Pertanian : 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
 - Industri : 2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Konstruksi
 - Jasa : 6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Dari tabel 4.2 terlihat sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Ternate adalah sektor jasa di mana selama tiga tahun berturut-turut persentasenya mencapai 80 persen. Di sisi lain, penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan, bahkan di tahun 2014 hanya 6.79 persen yang bekerja di sektor ini. Secara kasat mata, terlihat jelas sektor

pertanian semakin tergerus arus modernisasi dan urbanisasi. Para pemuda usia kerja cenderung memilih bekerja di sektor industri dan jasa dibandingkan sektor pertanian. Pergeseran *Leading Sector* ini mengindikasikan telah terjadinya kemajuan di Kota Ternate. Di lain pihak, pergeseran pola pikir pemuda yang enggan terjun ke sektor pertanian bisa mengancam ketahanan pangan di masa depan. Perlu pemikiran mendalam dan kebijakan yang tepat dalam mengkaji masalah ini. Bisa jadi pula, bukan angkatan kerja yang enggan terjun ke sektor pertanian, namun sektor pertanian sendiri sudah tidak mampu menampung para pendatang baru dunia kerja disebabkan antara lain lahan semakin menyempit. Untuk memastikan kondisi tersebut, perlu analisa lebih lanjut.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Ternate, 2012-2014

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	23.94	26.72	25.71
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	10.35	6.86	8.45
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.43	2.98	2.76
Buruh/ karyawan/ pegawai	48.80	48.65	47.38
Pekerja bebas di pertanian	1.98	1.75	0.06
Pekerja bebas di non pertanian	1.09	2.24	4.33
Pekerja keluarga/tak dibayar	10.41	10.80	11.32

Sumber: BPS, Sakernas 2012-2014

Tabel 4.3 menyajikan profil pekerja menurut status pekerjaan utamanya. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hampir separuh pekerja di Kota Ternate berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Rata-rata hanya 35 persen yang berstatus berusaha baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar ataupun berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Dapat disimpulkan bahwa di Kota Ternate sebagian besar masyarakatnya lebih memilih mencari kerja daripada menciptakan lapangan kerja/usaha.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu di Kota Ternate, 2012-2014

Jumlah Jam Kerja	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1-7	0.40	0.22	0.45
8-14	1.55	0.67	4.52
15-24	5.83	5.19	9.94
25-34	9.57	9.47	12.58
35+	82.65	84.45	72.51

Sumber: BPS, Sakernas 2012-2014

Jumlah jam kerja ideal (sesuai kesepakatan para ahli) adalah minimal 35 jam seminggu. Presentase penduduk Kota Ternate yang bekerja kurang dari jam kerja normal (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu dan termasuk yang mempunyai

pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dll) tercatat sebesar 27.49 persen pada 2014. Angka ini jauh di atas tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing sebesar 17.35 persen dan 15.55 persen.

<http://ternatekota.bps.go.id>



Pola Konsumsi

Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk non makanan.

Dalam publikasi ini, pola konsumsi makanan dan non makanan didapatkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014.

Perkembangan Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, dikenal 3 indikator penting dalam analisis kemiskinan, yaitu *Head Count Index (HCI-P0)*, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*). HCI menjelaskan persentase penduduk yang berada di

bawah garis kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 5.1 menunjukkan garis kemiskinan di Kota Ternate selama tahun 2012-2013 mengalami kenaikan 6,65 persen, yaitu dari Rp. 392.362,- menjadi Rp. 418.472,-. Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan adanya kenaikan harga-harga barang di Kota Ternate sepanjang 2012-2013, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang sama (2100 kkal/kapita/hari) membutuhkan dana yang lebih besar.

Jumlah penduduk miskin selama dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada 2012 penduduk miskin mencapai 7.95 ribu jiwa, turun menjadi 6.61 ribu jiwa pada 2013.

Pada periode 2012-2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga cenderung menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 0.27 pada 2012 menjadi 0.08 pada 2013. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada 2012 tercatat sebesar 0.02 dan turun menjadi 0.00 pada 2013. Penurunan kedua indeks ini sepanjang 2012-2013 mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 5.1 Angka Kemiskinan di Kota Ternate, 2012-2014

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	7.95	6.61	-
Penduduk Miskin (Persen)	4.00	3.24	-
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.27	0.08	-
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.02	0.00	-
Garis Kemiskinan (Rp)	392362	418472	-
Gini Ratio	0.289	0.254	0.293

Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Ket: Data 2014 belum tersedia

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah Indeks Gini (G). Nilai dari Indeks Gini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Penghitungan Indeks Gini pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan

pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan.

Berdasarkan indeks gini pada Tabel 5.1 tampak bahwa distribusi pengeluaran penduduk mengalami penurunan dari 0.289 pada tahun 2012 menjadi 0.254 pada tahun 2013. Angka ini kembali naik menjadi 0.293 pada 2014. Ini berarti selama 2013-2014 terjadi peningkatan tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran penduduk.

Pengeluaran Rumah Tangga

Secara umum data konsumsi/pengeluaran Susenas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.2 Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Ternate, 2012-2014

Tahun	Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	Kenaikan Nominal Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2012	967793	-
2013	1081922	11.79
2014	1106200	2.24

Sumber: BPS, Susenas 2012-2014

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Bila kemampuan daya beli penduduk mengalami penurunan akan mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Berdasarkan hasil susenas pada Tabel 5.2, pengeluaran per kapita sebulan pada 2013 mengalami peningkatan sebesar 11.79 persen dibanding 2012. Pada 2013-2014, pengeluaran per kapita sebulan mengalami kenaikan lebih lambat yaitu hanya sebesar 2.24 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan daya beli penduduk selama 2012-2014 meskipun dengan kecepatan yang sedikit melambat pada tahun 2013-2014.

Grafik 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ternate, 2012-2014



Sumber : BPS, Susenas 2012-2014

Grafik 5.1 menyajikan komposisi pengeluaran yang dilakukan penduduk Kota Ternate selama 2012-2014. Terlihat, pengeluaran untuk bukan makanan selalu lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan. Kondisi ini merupakan ciri khas masyarakat perkotaan di mana pengeluaran bukan makanan cenderung lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Persentase pengeluaran non makanan yang semakin besar dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi pengeluaran.

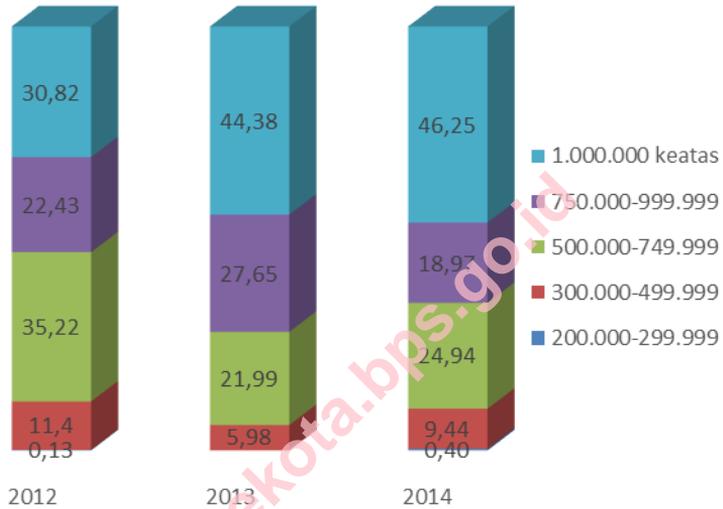
Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ternate, 2014

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita sebulan	
	Nominal	Persentase
(1)	(2)	(3)
Makanan	462842.35	41.84
Non Makanan	643358.24	58.16
Perumahan	382768.12	34.60
Barang dan Jasa	193202.60	17.92
Pakaian	34137.93	3.09
Barang Tahan Lama	18037.00	1.63
Pajak dan Asuransi	6162.94	0.56
Pesta dan Upacara	4049.65	0.37
Jumlah	1106200.59	100.00

Sumber : BPS, Susenas 2014

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa pada 2014 sebanyak 58.16 persen pendapatan penduduk dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan. Pengeluaran non makanan paling banyak dikeluarkan untuk biaya perumahan yaitu 34.60 persen dari total pengeluaran per kapita sebulan. Sedangkan pengeluaran non makanan paling sedikit dikeluarkan untuk biaya pesta dan upacara. Hal ini mengisyaratkan bahwa biaya tempat tinggal di Kota Ternate cukup mahal sehingga mengambil porsi anggaran terbesar di pengeluaran non makanan.

Grafik 5.2 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Ternate, 2012-2014



Sumber : BPS, Susenas 2012-2014

Terlihat, tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kota Ternate terus meningkat dari tahun ke tahun (grafik 5.2). Jika dicermati dari persentase penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran, jelas terlihat kelompok pengeluaran perkapita sebulan di atas 1000000 terus meningkat selama 2012-2014. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan, di mana pada tahun 2012 baru 30.82 persen penduduk yang pengeluarannya perkapitanya di atas 1000000, sementara pada tahun 2014 meningkat hingga 46,25 persen.



**Perumahan &
Lingkungan**

<http://ternatekita.bps.go.id>

Perumahan & Lingkungan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah fasilitas perumahan yang dimiliki oleh penduduknya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain pangan dan sandang. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk terus bertahan hidup. Saat ini, keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi sudah menjadi gaya hidup dan simbol status bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur".

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah dan fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas dilihat dari jenis lantai terluas, atap dan dinding. Sedangkan fasilitas dilihat dari sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga dan sumber penerangan.

Kualitas Rumah Tinggal

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial

ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi suatu rumah tangga. Suatu rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki atap, lantai dan dinding. Di samping itu kualitas ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Ternate, 2012-2014

Indikator Kualitas Perumahan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah	98.52	97.87	98.02
Atap Layak ¹⁾	99.54	100.00	100.00
Dinding Permanen ²⁾	97.83	98.28	98.95

Sumber : BPS, Susenas 2012-2014

Catatan : 1) atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes

2) tembok dan kayu

Berdasarkan data Susenas 2012-2014, kualitas perumahan pelan tapi konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rumah yang berlantai bukan tanah sebanyak 98.02 persen (2014), sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 97.87 persen. Bisa dikatakan untuk lantai bukan tanah cukup stabil di angka 98 persen. Rumah dengan atap layak naik dari 99.54 persen (2012), menjadi 100 persen (2013 dan 2014). Rumah dengan dinding permanen sebesar 98.95 persen pada

tahun 2014, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 98.28 persen.

Kualitas rumah di kabupaten/kota di Maluku Utara dilihat dari jenis lantai, atap dan dinding terluasnya disajikan pada Tabel E1.

Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas yang akan dipotret di sini adalah ketersediaan air minum bersih, jamban sendiri dan penerangan yang memadai. Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air minum bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Sumber air minum yang berasal dari air kemasan, isi ulang, dan leding masih dianggap lebih baik karena sifatnya yang higienis dibanding sumber lainnya.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kota Ternate, 2012-2014

Indikator Fasilitas Perumahan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Air minum ledeng, kemasan dan Isi ulang	76.96	81.80	80.46
Jamban Sendiri	70.44	74.09	79.81

Sumber : BPS, Susenas 2012-2014

Air minum ledeng merupakan salah satu pelayanan publik yang sangat penting untuk mengimbangi pertumbuhan pemukiman. Pada 2014, 80.46 persen rumah tangga di Kota Ternate telah menggunakan air minum ledeng, kemasan dan isi ulang. Angka ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 81,80 persen.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri.

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa rumah tangga di Kota Ternate yang mempunyai fasilitas jamban sendiri selama kurun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, dari 70.44 persen pada tahun 2012 menjadi 79.81 persen pada tahun 2014.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kota Ternate, 2012-2014

Sumber Penerangan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	96.07	96.24	97.74
Listrik Non PLN	3.93	3.53	2.26
Lainnya ¹⁾	-	0.23	-

Sumber : BPS, Susenas 2012-2014

Catatan : 1) Meliputi petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik, karena cahaya listrik lebih terang dan lebih sehat dibandingkan sumber penerangan lainnya. Tabel 6.3 menunjukkan bahwa selama 2012-2014 rumah tangga pengguna listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, pengguna tersebut telah mencapai 97.74 persen. Namun, masih ada 2.26 persen rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN, seperti di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua di mana penduduknya mayoritas masih menggunakan generator. Meskipun dari sisi jumlah rumah tangga yang terlayani listrik terus meningkat, namun perlu diupayakan lagi untuk mengurangi tingkat pemadaman listrik. Dan tentu, Pulau Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua merupakan prioritas utama untuk segera dilakukan penyediaan listrik agar masyarakat di wilayah tersebut juga merasakan hasil pembangunan setelah 70 tahun Indonesia merdeka.

Status Penguasaan Bangunan

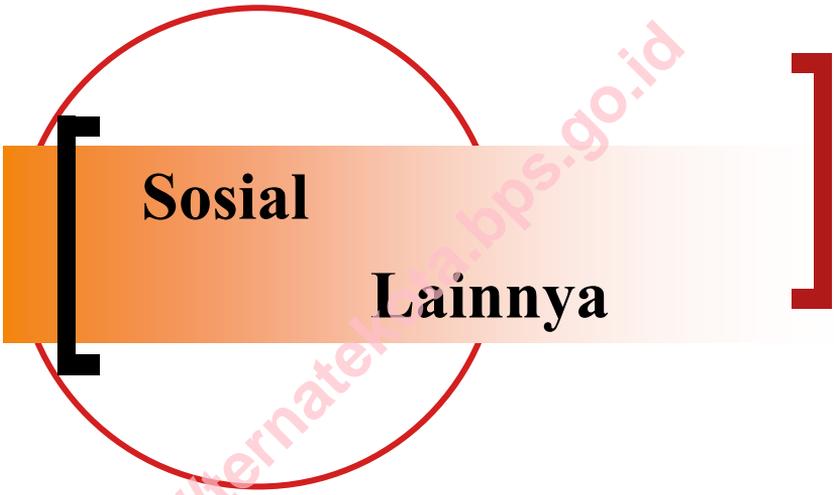
Selain kualitas dan fasilitas perumahan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah status penguasaan bangunan yang ditempati.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan yang Ditempati, 2013-2014

Status Penguasaan Bangunan yang Ditempati	2013	2014
(1)	(3)	(4)
Milik Sendiri	68.27	71.10
Kontrak	3.31	3.06
Sewa	13.96	13.15
Bebas sewa milik orang lain	2.90	1.87
Bebas sewa milik orang tua/sanak saudara	10 15	8.93
Dinas	1.24	1.56
Lainnya	0.17	0.34

Sumber : BPS, Susenas 2013-2014

Hasil Susenas 2014 menunjukkan mayoritas rumah tangga di Kota Ternate menempati bangunan milik sendiri (yaitu sebesar 71.10 persen, sedangkan 13.15 persen lainnya sewa (kos bulanan), sebagian kecil saja yang berstatus kontrak, bebas sewa, dinas maupun lainnya.



Sosial Lainnya

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk yang melakukan perjalanan, persentase penduduk yang menguasai teknologi komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, desktop dan laptop, persentase rumah tangga yang membeli beras miskin, serta persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan.

Perjalanan

Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan jarak perjalanan pergi dan pulang (PP) sejauh minimal 100 km dan tidak dalam rangka sekolah atau mencari nafkah serta tidak dilakukan secara rutin.

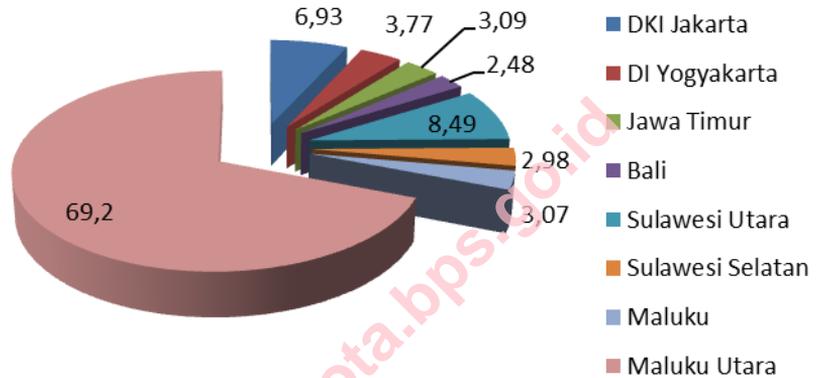
Tabel 7.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan menurut Tujuan Utama di Kota Ternate, 2013-2014

Tujuan Utama	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Berlibur/ Rekreasi	3.30	18.33
Profesi/ Bisnis	9.41	25.69
Misi/ Pertemuan/ Kongres	0.00	0.00
Pendidikan/ Pelatihan	1.63	4.76
Kesehatan	1.87	2.29
Berziarah/ Keagamaan	0.00	0.00
Mengunjungi Teman/ Keluarga	81.23	45.39
Olahraga/ Kesenian	0.00	0.00
Lainnya	2.56	3.54
% Penduduk yang Melakukan Perjalanan	7.84	2.76

Sumber : BPS, Susenas 2013-2014

Pada 2014, penduduk Kota Ternate yang melakukan perjalanan sebanyak 2.76 persen, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang sebanyak 7.84 persen. Dari jumlah tersebut, 45.39 persen melakukan perjalanan dalam rangka mengunjungi teman/ keluarga, 25.69 persen dalam rangka profesi/ bisnis, 18.33 persen dalam rangka berlibur/ rekreasi, dan hanya sebagian kecil yang bertujuan untuk pendidikan/ pelatihan, kesehatan dan lainnya.

Grafik 7.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan menurut Provinsi Tujuan Utama di Kota Ternate, 2014



Sumber : BPS, Susenas 2013-2014

Hasil Susenas 2014 menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Ternate melakukan perjalanan di wilayah Provinsi Maluku Utara, yaitu sebanyak 69.2 persen. Sisanya, melakukan perjalanan ke Provinsi Sulawesi Utara (8.49 persen), DKI Jakarta (6.93 persen), DI Yogyakarta (3.77 persen), Jawa Timur (3.09 persen), Maluku (3.07 persen), Sulawesi Selatan (2.98 persen) dan Bali (2.48 persen).

Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kota Ternate, 2013-2014

Sarana Komunikasi dan Informasi	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Telepon Rumah	3.80	3.13
Telepon Seluler/ HP	99.18	97.99
Desktop/ PC	6.55	8.19
Laptop/ Note book	39.21	41.70
Internet	20.85	24.88

Sumber : BPS, Susenas 2013-2014

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sarana komunikasi pun terus mengalami perkembangan. Sarana komunikasi dan informasi yang dipotret dalam Susenas antara lain telepon rumah, telepon seluler/ HP, desktop/ PC, laptop/ note book dan akses internet.

Tabel 7.2 memberi gambaran bahwa penggunaan telepon seluler saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibanding telepon rumah. Begitu pula, laptop/ note book lebih populer daripada desktop/ PC. Telepon seluler dan laptop lebih digemari masyarakat kemungkinan karena aspek mobilitasnya lebih mudah.

Di sisi lain, meskipun Kota Ternate merupakan pusat pendidikan dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, persentase penduduk yang mengakses internet selama tahun 2014 masih sangat sedikit. Hanya 24.88 persen penduduk yang mengakses

internet baik melalui telepon seluler, modem, warnet, atau lainnya. Angka ini sedikit meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 20.58 persen. Hal ini menunjukkan kemajuan teknologi informasi di Kota Ternate belum setara dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

Beras Miskin (Raskin)

Tabel 7.3 Beberapa Indikator Raskin di Kota Ternate, 2013-2014

Indikator Raskin	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Rumah Tangga Pembeli Raskin (%)	11.75	11.47
Rata-rata Raskin yang Dibeli selama 3 Bulan (Kg)	37.52	10.67
Rata-rata Harga Raskin (Rp/Kg)	2020	1989

Sumber : BPS, Susenas 2013-2014

Pada tabel 7.3, proporsi rumah tangga yang membeli raskin di Kota Ternate pada tahun 2014 sebanyak 11,47 persen, rata-rata banyaknya (volume) raskin yang dibeli selama 3 bulan sebesar 10.67 kilo gram, dan rata-rata harga raskin adalah 1989 rupiah per kilo gram.

Korban Kejahatan

Indikator kesejahteraan lainnya adalah persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan selama 2014. Diasumsikan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka korban kejahatan akan semakin berkurang

Tabel 7.4 Beberapa Indikator Korban Kejahatan di Kota Ternate, 2013-2014

Indikator Korban Kejahatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Penduduk yang menjadi Korban Kejahatan (%)	0.53	0.47
Kejahatan yang Dilaporkan ke Polisi (%)	26.22	0.00

Sumber : BPS, Susenas 2013-2014

Di tahun 2014, penduduk yang menjadi korban kejahatan sebanyak 0.47 persen, di mana dari seluruh kasus tersebut keseluruhannya tidak ada yang dilaporkan ke polisi. Hal ini dikarenakan berbagai hal. Bisa jadi pelaku kejahatannya adalah anggota keluarganya sendiri, orang yang dikenal, atau mungkin kekhawatiran proses hukum yang berbelit-belit serta biaya penanganan kasus yang mahal.

LAMPIRAN

<http://termekota.bps.go.id>

Tabel A1. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014

Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	100887	102884	104807	106791	108769
Halmahera Tengah	42980	44301	45712	47079	48414
Kepulauan Sula	85586	87481	89374	91406	93435
Halmahera Selatan	199629	203822	207728	211682	215791
Halmahera Utara	162585	166077	169599	173117	176573
Halmahera Timur	73411	75834	78112	80526	82914
Pulau Morotai	52915	54401	55998	57565	59102
Pulau Taliabu	47491	48134	48880	49510	50067
Ternate	187322	192392	197566	202728	207789
Tidore Kepulauan	90530	91886	93299	94493	95813
Maluku Utara	1043336	1067212	1091075	1114897	1138667

Tabel A2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate, 2014

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persebaran Penduduk (Persen)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pulau Ternate	37.23	16209	7.80	435.37
Moti	24.80	4814	2.32	194.11
Pulau Batang Dua	29.04	2712	1.31	93.39
Pulau Hiri	6.70	3003	1.45	448.21
Ternate Selatan	16.98	71476	34.40	4209.42
Ternate Tengah	10.85	58698	28.25	5409.95
Ternate Utara	14.38	50877	24.48	3538.04
Hutan Lindung	22.05	-	-	-
Kota Ternate	162.03	207789	100	1282.41

Tabel A3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Komposisi Penduduk (%)			Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	33.59	62.44	3.97	60.15
Halmahera Tengah	37.23	60.00	2.77	66.67
Kepulauan Sula	36.64	60.40	2.97	65.57
Halmahera Selatan	38.00	59.05	2.95	69.36
Halmahera Utara	34.77	62.23	2.99	60.69
Halmahera Timur	34.41	62.99	2.60	58.75
Pulau Morotai	36.84	59.92	3.25	66.90
Pulau Taliabu	38.35	58.41	3.24	71.20
Ternate	28.20	69.21	2.59	44.49
Tidore Kepulauan	31.85	64.45	3.71	55.16
Maluku Utara	34.32	62.63	3.05	59.67

Tabel A4. Persentase Wanita menurut Usia pada Perkawinan Pertama menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Umur pada Perkawinan Pertama (Tahun)				
	<16	16	17-18	19-24	25+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	1.48	5.81	28.21	51.17	13.33
Halmahera Tengah	7.49	7.36	26.94	46.39	11.82
Kepulauan Sula	7.94	7.38	30.26	43.73	10.69
Halmahera Selatan	4.37	6.70	28.73	51.02	9.17
Halmahera Utara	4.03	7.58	25.16	50.97	12.25
Halmahera Timur	8.71	11.50	26.65	46.47	6.68
Pulau Morotai	6.20	4.89	21.26	62.51	5.13
Ternate	2.47	5.18	16.33	59.45	16.57
Tidore Kepulauan	2.24	3.87	18.55	57.15	18.19
Provinsi	4.51	6.61	24.62	52.20	12.06

Tabel B1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	16.62	12.13	11.33
Halmahera Tengah	25.40	21.96	28.00
Kepulauan Sula	28.89	15.44	16.10
Halmahera Selatan	17.13	21.30	21.05
Halmahera Utara	15.27	14.09	13.56
Halmahera Timur	24.68	12.37	11.18
Pulau Morotai	18.08	16.58	24.05
Ternate	16.74	13.53	12.97
Tidore Kepulauan	10.33	10.16	10.23
Maluku Utara	18.53	15.34	15.70

Tabel B2. Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Sebulan yang Lalu menurut Kabupaten/Kota dan Jenis/Cara Pengobatan yang Digunakan, 2014

Kabupaten/Kota	Tradisional	Modern	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	32.26	94.31	1.41
Halmahera Tengah	28.66	83.71	13.58
Kepulauan Sula	40.52	84.87	2.18
Halmahera Selatan	36.88	82.94	3.38
Halmahera Utara	45.63	82.30	1.14
Halmahera Timur	40.47	90.46	1.51
Pulau Morotai	52.96	95.74	23.18
Ternate	11.02	94.79	1.48
Tidore Kepulauan	25.61	95.69	2.27
Maluku Utara	35.25	87.92	5.20

Tabel B3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Kabupaten/Kota dan Tempat/Cara Berobat, 2014

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	23.86	2.56	9.44
Halmahera Tengah	13.59	0.00	6.44
Kepulauan Sula	28.99	2.15	23.06
Halmahera Selatan	9.66	0.00	10.18
Halmahera Utara	12.41	7.37	20.50
Halmahera Timur	17.46	0.00	2.38
Pulau Morotai	7.00	1.95	1.12
Ternate	4.15	4.09	49.67
Tidore Kepulauan	7.74	0.00	22.67
Maluku Utara	11.98	2.31	17.68

*^j Lainnya : Praktek Batra, Dukun Bersalin, dan lainnya.

Tabel B3. (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Puskesmas/ Pustu	Praktek Nakes	Lainnya ^{*j}
(1)	(2)	(3)	(4)
Halimahera Barat	43.81	14.57	5.75
Halimahera Tengah	68.45	6.09	5.43
Kepulauan Sula	31.02	9.39	5.38
Halimahera Selatan	52.03	17.37	10.76
Halimahera Utara	40.46	12.82	6.45
Halimahera Timur	67.15	6.64	6.37
Pulau Morotai	85.46	1.12	3.35
Ternate	36.03	4.45	1.61
Tidore Kepulauan	60.88	5.41	3.30
Maluku Utara	51.18	10.54	6.30

*j) Lainnya : Praktek Batra, Dukun Bersalin, dan lainnya.

Tabel B4. Persentase Balita menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun Bersalin	Famili & Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	8.87	60.92	0.58	28.83	0.80
Halmahera Tengah	10.30	41.99	1.68	39.97	6.06
Kepulauan Sula	6.95	33.80	0.51	52.40	6.33
Halmahera Selatan	5.23	35.05	2.94	54.93	1.84
Halmahera Utara	4.20	50.98	0.18	43.62	1.02
Halmahera Timur	13.29	51.01	0.55	31.21	3.94
Pulau Morotai	0.00	50.03	0.00	47.96	2.01
Ternate	40.75	50.26	0.00	5.61	3.37
Tidore Kepulauan	30.86	47.66	0.00	20.62	0.86
Maluku Utara	13.52	45.01	0.93	37.82	2.73

Tabel B5. Persentase Anak Usia 1-4 Tahun yang pernah diberi Imunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Apakah diberi Imunisasi Lengkap, 2014

Kabupaten/Kota	Apakah diberi Imunisasi Lengkap	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	50.18	49.82
Halmahera Tengah	71.65	28.35
Kepulauan Sula	31.94	68.06
Halmahera Selatan	90.36	9.64
Halmahera Utara	76.71	23.29
Halmahera Timur	71.22	28.78
Pulau Morotai	36.90	63.10
Ternate	93.52	6.48
Tidore Kepulauan	96.40	3.60
Maluku Utara	72.35	27.65

Tabel C1. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	99.40	98.73	99.06
Halmahera Tengah	99.76	95.76	97.81
Kepulauan Sula	97.87	98.28	98.07
Halmahera Selatan	99.04	94.18	96.64
Halmahera Utara	98.07	97.51	97.80
Halmahera Timur	99.81	96.69	98.35
Pulau Morotai	100.00	98.87	99.45
Ternate	100.00	99.63	99.82
Tidore Kepulauan	99.82	97.74	98.78
Maluku Utara	99.18	97.51	98.36

Tabel C2. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk 25 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2012-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	7.36	7.55	7.71
Halmahera Tengah	7.28	7.69	7.74
Kepulauan Sula	7.42	7.86	7.91
Halmahera Selatan	6.95	6.99	7.03
Halmahera Utara	7.92	7.97	7.98
Halmahera Timur	7.02	7.33	7.34
Pulau Morotai	6.70	6.81	6.84
Ternate	10.58	11.06	11.11
Tidore Kepulauan	8.44	8.61	8.72
Maluku Utara	8.04	8.27	8.34

Tabel C3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2014

Kabupaten/Kota	Tidak Punya Ijazah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	16.65	27.14	22.50	25.46	8.25
Halmahera Tengah	23.23	24.43	23.40	18.70	10.25
Kepulauan Sula	12.29	36.86	19.62	23.44	7.78
Halmahera Selatan	24.71	32.55	18.60	17.67	6.47
Halmahera Utara	20.45	26.74	22.47	23.83	6.51
Halmahera Timur	15.39	33.45	23.99	21.31	5.86
Pulau Morotai	28.78	31.20	19.55	17.19	3.27
Ternate	7.23	11.30	16.51	48.80	16.17
Tidore Kepulauan	10.95	25.90	23.82	27.21	12.13
Maluku Utara	16.58	26.53	20.38	27.35	9.17

Tabel D1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	74.95	71.24	70.50
Halmahera Tengah	74.61	59.15	69.17
Kepulauan Sula	61.65	59.34	59.63
Halmahera Selatan	70.14	72.44	66.47
Halmahera Utara	68.82	62.51	60.12
Halmahera Timur	69.35	67.70	66.86
Pulau Morotai	65.89	65.93	56.92
Ternate	56.67	55.50	62.14
Tidore Kepulauan	63.70	69.15	66.75
Maluku Utara	66.05	64.35	63.88

Tabel D2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	3.03	1.28	4.00
Halmahera Tengah	9.43	7.68	4.90
Kepulauan Sula	5.67	4.82	9.67
Halmahera Selatan	5.01	4.15	2.34
Halmahera Utara	1.54	2.25	4.17
Halmahera Timur	6.88	6.20	4.35
Pulau Morotai	3.91	4.22	3.70
Ternate	7.77	4.73	8.72
Tidore Kepulauan	2.19	1.81	3.69
Maluku Utara	4.82	3.80	5.29

Tabel E1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Lantai Terluas, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas		
	Marmer/ Keramik/ Granit	Tegel/ teraso	Semen
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	18.47	4.62	59.64
Halmahera Tengah	11.54	1.62	66.61
Kepulauan Sula	13.88	6.64	59.11
Halmahera Selatan	11.74	1.57	62.51
Halmahera Utara	17.79	4.32	62.07
Halmahera Timur	9.06	4.21	60.11
Pulau Morotai	7.41	2.77	61.12
Ternate	56.57	1.81	38.54
Tidore Kepulauan	25.64	1.35	69.28
Maluku Utara	22.85	3.24	57.62

Tabel E1. (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas		
	Kayu	Tanah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0.98	16.26	0.21
Halmahera Tengah	10.87	9.36	0.00
Kepulauan Sula	7.67	6.17	6.52
Halmahera Selatan	11.93	11.32	0.93
Halmahera Utara	4.04	11.78	0.00
Halmahera Timur	8.74	17.54	0.34
Pulau Morotai	1.84	26.02	0.84
Ternate	1.11	1.98	0.00
Tidore Kepulauan	1.11	2.62	0.00
Maluku Utara	5.32	9.86	1.11

Tabel E2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Atap Terluas, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas		
	Beton	Genteng	Sirap
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	1.46	0.00	0.20
Halmahera Tengah	0.20	2.14	0.37
Kepulauan Sula	1.94	2.72	0.25
Halmahera Selatan	0.95	0.76	0.20
Halmahera Utara	1.21	1.93	0.00
Halmahera Timur	0.69	1.98	0.00
Pulau Morotai	4.42	1.02	0.19
Ternate	1.57	0.30	0.00
Tidore Kepulauan	1.04	0.00	0.00
Maluku Utara	1.43	1.13	0.11

Tabel E2. (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas			
	Seng	Asbes	Ijuk/Rumbia	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Halmahera Barat	90.20	0.00	3.25	4.89
Halmahera Tengah	93.14	0.00	4.15	0.00
Kepulauan Sula	69.13	8.68	13.16	4.12
Halmahera Selatan	81.23	1.93	14.93	0.00
Halmahera Utara	92.62	0.00	4.24	0.00
Halmahera Timur	89.44	0.65	2.91	4.33
Pulau Morotai	72.18	0.47	21.74	0.00
Ternate	98.13	0.00	0.00	0.00
Tidore Kepulauan	92.91	0.17	1.66	4.22
Maluku Utara	87.06	1.57	6.99	1.72

Tabel E3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	76.99	17.47	3.40	2.14
Halmahera Tengah	56.29	43.26	0.45	0.00
Kepulauan Sula	66.14	30.73	2.70	0.43
Halmahera Selatan	66.75	26.73	5.66	0.85
Halmahera Utara	68.78	29.17	2.05	0.00
Halmahera Timur	40.85	57.75	0.27	1.14
Pulau Morotai	52.97	41.20	4.54	1.29
Ternate	91.50	7.45	0.00	1.05
Tidore Kepulauan	79.42	15.67	1.00	3.91
Maluku Utara	70.56	25.98	2.35	1.11

Tabel E4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2014

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	62.46	8.32	17.89	11.33
Halmahera Tengah	56.33	7.51	17.89	18.27
Kepulauan Sula	53.55	6.74	6.07	33.65
Halmahera Selatan	41.88	12.03	24.58	21.51
Halmahera Utara	52.81	14.17	18.97	14.05
Halmahera Timur	44.88	7.81	21.47	25.84
Pulau Morotai	54.02	2.13	15.85	28.00
Ternate	79.81	19.63	0.56	0.00
Tidore Kepulauan	72.94	9.83	10.85	6.38
Maluku Utara	58.36	11.51	13.95	16.18

Tabel E5. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset			
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung / Cubluk	Tidak Pakai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	97.99	2.01	0.00	0.00
Halmahera Tengah	83.10	8.18	8.48	0.24
Kepulauan Sula	90.15	9.85	0.00	0.00
Halmahera Selatan	80.28	0.85	17.88	1.00
Halmahera Utara	94.06	2.98	2.95	0.00
Halmahera Timur	83.94	8.98	7.08	0.00
Pulau Morotai	93.88	4.92	1.19	0.00
Ternate	94.40	4.94	0.55	0.10
Tidore Kepulauan	98.91	1.09	0.00	0.00
Maluku Utara	91.19	4.22	4.39	0.20

Tabel E6. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2014

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
	Tangki/ SPAL	Kolam/ Sawah	Sungai/ Danau/ Laut
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	75.73	0.00	3.62
Halmahera Tengah	71.19	0.00	15.76
Kepulauan Sula	46.29	0.00	10.39
Halmahera Selatan	60.39	0.39	20.43
Halmahera Utara	81.87	0.29	7.36
Halmahera Timur	65.26	3.44	6.82
Pulau Morotai	37.08	0.00	0.98
Ternate	90.40	0.00	0.29
Tidore Kepulauan	78.65	0.41	0.19
Maluku Utara	70.06	0.42	7.68

Tabel E6. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	12.56	7.93	0.26
Halmahera Tengah	5.72	6.72	0.62
Kepulauan Sula	21.89	20.66	0.77
Halmahera Selatan	3.28	15.51	0.00
Halmahera Utara	2.17	7.89	0.42
Halmahera Timur	9.60	14.60	0.28
Pulau Morotai	31.24	29.57	1.12
Ternate	8.46	0.85	0.00
Tidore Kepulauan	14.57	6.18	0.00
Maluku Utara	10.49	11.05	0.29

Tabel E7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan, 2014

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan				
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Petromak/ Aladin	Pelita/ Sentir/ Obor	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	92.77	2.99	0.00	3.08	1.16
Halmahera Tengah	64.63	25.57	1.33	7.85	0.61
Kepulauan Sula	56.52	11.17	0.56	29.58	2.18
Halmahera Selatan	45.48	31.32	0.25	22.95	0.00
Halmahera Utara	73.13	14.23	0.24	11.83	0.57
Halmahera Timur	69.91	21.70	0.00	8.39	0.00
Pulau Morotai	74.67	10.07	0.00	13.22	2.05
Ternate	97.74	2.26	0.00	0.00	0.00
Tidore Kepulauan	98.71	0.00	0.00	1.29	0.00
Provinsi	74.36	13.07	0.20	11.75	0.61

DAFTAR PUSTAKA

- 2012, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2012.** Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
- 2012, **Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara 2012.** Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
- 2012, **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2012.** Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
- 2013, **Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara 2013.** Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
- 2013, **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2013.** Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
- 2014, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2014.** Ternate: Badan Pusat Statistik Kota Ternate
- 2015, **Kota Ternate dalam Angka 2015.** Ternate: Badan Pusat Statistik Kota Ternate

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari leding, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) ≥ 10 meter.

Angka Beban Ketergantungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 5 tahun dan 66 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Melek huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak usia sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, minimal selama satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja. bekerja dianggap sebagai pekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per km².

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengangguran

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pekerja tidak dibayar

Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga rumah tangga atau bahkan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Rata-rata lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapat tanda tamat ijazah.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak atau belum pernah bersekolah disekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

<http://ternatekota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://ternatekota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TERNATE

Jl. Salahuddin, Skep Telp: (0921) 3121650, Fax.: (0921) 3128868 Ternate

e-mail: bps8271@bps.go.id; bps8271@gmail.com